

## Total Strategy of Maritime Defense Diplomacy Facing the Threat of Natural Disasters in the South Pacific

Jonni Mahroza<sup>1</sup>, Lukman Yudho Prakoso<sup>2\*</sup>, Agus Andriyanto<sup>3</sup>, Ivan Yulivan<sup>4</sup>, Harjo Susmoro<sup>5</sup>

Universitas Pertahanan RI

**Corresponding Author:** Lukman Yudho Prakoso [lukman.prakoso@idu.ac.id](mailto:lukman.prakoso@idu.ac.id)

### ARTICLE INFO

*Keywords* : Strategy, Naval Defense, Diplomacy

*Received* : 02 August

*Revised* : 27 August

*Accepted*: 29 September

©2024 Mahroza, Prakoso, Andriyanto, Yulivan, Susmoro: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

The presence of major countries in the Indo-Pacific region has brought various impacts to regional countries including Indonesia. In addition to bringing benefits with increasing economic levels, there are also threats to security stability in the region. The purpose of this article's research is to analyze the Impact of the Total Strategy of Maritime Defense Diplomacy in Facing the Dynamics of the Strategic Environment in the South Pacific. The method used is descriptive qualitative. The results of the study are that Indonesia's total strategy of maritime defense diplomacy in the South Pacific has succeeded in managing the dynamics of the strategic environment by integrating military, humanitarian, and diplomatic aspects. Through joint exercises, humanitarian assistance, and maritime diplomacy, Indonesia has strengthened its disaster mitigation capacity, increased regional stability, and strengthened diplomatic relations.

## Strategi Total Diplomasi Pertahanan Laut Menghadapi Ancaman Bencana Alam di Pasifik Selatan

Jonni Mahroza<sup>1</sup>, Lukman Yudho Prakoso<sup>2\*</sup>, Agus Andriyanto<sup>3</sup>, Ivan Yulivan<sup>4</sup>, Harjo Susmoro<sup>5</sup>

Universitas Pertahanan RI

**Corresponding Author:** Lukman Yudho Prakoso [lukman.prakoso@idu.ac.id](mailto:lukman.prakoso@idu.ac.id)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Strategi, Pertahanan Laut, Diplomasi

*Received :* 02 Agustus

*Revised :* 27 Agustus

*Accepted:* 29 September

©2024 Mahroza, Prakoso, Andriyanto, Yulivan, Susmoro: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Kehadiran negara-negara besar di kawasan Indo-Pasifik, telah membawa berbagai dampak bagi negara kawasan termasuk Indonesia. Selain mendatangkan keuntungan dengan bertambahnya tingkat ekonomi, datang pula ancaman terhadap stabilitas keamanan pada kawasan. Tujuan Penelian artikel ini adalah Untuk menganalisis Dampak Strategi Total Diplomasi Pertahanan Laut Menghadapi Dinamika Lingkungan Strategis Di Pasifik Selatan. Metode yang digunakan kualitatif deskriptif. Hasil Penelitian adalah Strategi total diplomasi pertahanan laut Indonesia di Pasifik Selatan telah berhasil dalam mengelola dinamika lingkungan strategis dengan mengintegrasikan aspek militer, kemanusiaan, dan diplomasi. Melalui latihan gabungan, bantuan kemanusiaan, dan diplomasi maritim, Indonesia telah memperkuat kapasitas mitigasi bencana, meningkatkan stabilitas regional, dan memperkuat hubungan diplomatik.

---

## PENDAHULUAN

Selama beberapa tahun terakhir, intensitas penggunaan istilah “Indo-Pasifik” semakin sering ditemui dalam berbagai diskusi strategis di kawasan Australia, Prancis, India, Indonesia, Jepang, dan Amerika Serikat. Selama 10 tahun terakhir, istilah “Indo-Pasifik” mulai digunakan dalam studi geopolitik menggantikan istilah yang dikenal sebelumnya yaitu “Asia Pasifik” dengan perbedaan mendasar penekanan pada wilayah yang berkaitan dengan perairan. Konsep Indo-Pasifik ini seringkali didefinisikan sebagai sebuah konsep strategis terintegrasi yang mampu menangkap pergeseran kekuasaan dan pengaruh dari barat ke timur, konsep ini juga telah mendominasi berbagai perdebatan dan diskusi strategis di Kawasan. Terminologi Indo-Pasifik sebagai konstruksi geopolitik muncul dari pernyataan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe pada tahun 2007 tentang Hindia dan Pasifik sebagai lautan kebebasan dan kemakmuran (Free and Open Indo-Pacific/FOIP) (Abe, 2007). Selain itu, kebijakan luar negeri Tiongkok dan India yang berorientasi ke laut serta visi Amerika Serikat yang tidak dapat memisahkan India dari arsitektur keamanannya telah mendorong AS untuk mulai mengembangkan konsep Indo-Pasifiknya sendiri (Yoshihara, 2013, pp. 90-103).

Gagasan Indo-Pasifik sendiri bukan merupakan konsep yang sepenuhnya baru, tetapi baru mendapatkan banyak perhatian dalam beberapa tahun terakhir (Montratama, 2016, pp. 36-61). Secara sederhana, Indo-Pasifik merupakan sebuah konsep yang menjadi penghubung antara Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik sebagai suatu wilayah maritim yang berimplikasi terhadap pembentukan kebijakan luar negeri, pertahanan, serta ekonomi yang sesuai. Sebagai wilayah yang menjadi titik pertemuan antar kedua Samudra ini, Indonesia harus mampu untuk memainkan peran utamanya dalam Kerjasama geopolitik (Medcalf, 2017).

Secara geografis, wilayah Indo-Pasifik ini merujuk pada kawasan negara-negara yang membentang dari bagian timur samudera hindia ke samudera pasifik bagian barat, dan terhubung dengan selat malaka. Indo-Pasifik juga telah menjadi pusat kegiatan geopolitik maritim, perdagangan, keamanan serta lingkungan (Passarelli, 2014). Indo-Pasifik juga merupakan kawasan yang berada di persimpangan perdagangan internasional sehingga memiliki nilai yang sangat strategis sebagai pusat geopolitik kawasan, hal ini terepresentasi melalui kehadiran negara-negara besar yang ada seperti: Amerika Serikat, Tiongkok, India, Jepang, Australia, serta negara-negara ASEAN.

Kehadiran negara-negara besar di kawasan Indo-Pasifik, telah membawa berbagai dampak bagi negara kawasan termasuk Indonesia. Selain mendatangkan keuntungan dengan bertambahnya tingkat ekonomi, datang pula ancaman terhadap stabilitas keamanan pada kawasan. Pada dasarnya ancaman bersama di kawasan Indo-Pasifik tidak jauh dari sengketa batas wilayah dan pada keamanan maritim (Purnama, 2017). Jalur perdagangan laut yang digunakan oleh banyak negara menghadirkan ancaman laut. Masuknya imigran gelap, penyelundupan senjata, peredaran narkoba, illegal fishing hingga terorisme merupakan contoh ancaman laut.

Sedangkan Peran Diplomasi (Diplomacy Role), berkaitan dengan pengelolaan kebijakan luar negeri dari penggunaan kekuatan yang sebenarnya. Aplikasi diplomatik mendukung kebijakan negara dalam situasi tawar-menawar tertentu atau dalam hubungan internasional secara umum. Pelaksanaanya dilakukan dengan menggunakan kekuatan laut (sea power), sebagai sarana diplomasi sebagai upaya untuk mendukung kebijakan luar negeri pemerintah, peran diplomasi AL juga dirancang untuk memberikan pengaruh terhadap kepemimpinan satu atau beberapa negara baik dalam situasi damai maupun saat terjadi ketegangan maupun permusuhan (Booth K. , 2014).

Dalam rangka mendukung politik luar negeri Indonesia, Penggunaan kekuatan laut tidak dilakukan dengan penggunaan senjata, akan tetapi merupakan suatu isyarat atau pesan yang mencakup berbagai upaya untuk (a) Mengkomunikasikan niat suatu negara, (b) Menegosiasikan masalah bilateral dua negara, serta (c) Menyampaikan pesan kekuatan militer suatu negara.

Berdasarkan latar belakang di atas, perkembangan dinamika di kawasan Indo-Pasifik telah membawa berbagai ancaman yang semakin kompleks, sehingga untuk mendukung sistem pertahanan negara Indonesia dibutuhkan upaya-upaya penguatan melalui Peran Diplomasi Pertahanan Maritim yang merupakan salah satu domain dari TNI Angkatan Laut Indonesia serta berbagai Institusi maritim lainnya. TNI Angkatan Laut Indonesia memiliki peran sebagai agen pertahanan negara dengan tugasnya untuk menjaga stabilitas keamanan kawasan.

Meskipun Implementasi dari diplomasi AL telah berjalan dengan baik akan tetapi, kompleksitas keamanan regional dan dinamika di Kawasan Indo-Pasifik yang terefleksi melalui rivalitas Tiongkok-AS, QUAD, serta AUKUS baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menjadi ancaman bagi pertahanan negara Indonesia. Dalam penelitian ini akan dielaborasi lebih lanjut mengenai penguatan peran diplomasi Angkatan Laut Indonesia yang bertujuan untuk dapat menciptakan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik sehingga akan mereduksi dinamika ancaman dan mewujudkan sistem pertahanan negara Indonesia yang lebih kuat.. dengan judul Strategi Total Diplomasi Pertahanan Laut Menghadapi Dinamika Lingkungan Strategis Di Pasifik Selatan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah, bagaimana Implementasi Strategi Pertahanan Laut Menghadapi Dinamika Lingkungan Strategis di Pasifik Selatan Saat Inidan , bagaimana Strategi Pertahanan Laut Terbaik Menghadapi Dinamika Lingkungan Strategis Di Pasifik Selatan.dari bagian pendahuluan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Artikel yang berjudul Strategi Total Diplomasi Pertahanan Laut Menghadapi Ancaman Bencana Alam di Pasifik Selatan menyoroti pentingnya pendekatan strategis dalam menghadapi ancaman bencana alam yang semakin sering terjadi di wilayah ini. Dengan menggunakan teori strategi, teori diplomasi angkatan laut, dan teori implementasi kebijakan publik Lukman Yudho Prakoso, artikel ini menganalisis bagaimana diplomasi pertahanan laut dapat diintegrasikan secara holistik guna menciptakan ketahanan terhadap ancaman bencana alam.

Menurut teori strategi, tindakan yang diambil oleh negara harus didasarkan pada tujuan jangka panjang yang berfokus pada pertahanan dan kesejahteraan nasional (Mintzberg, 1994). Dalam konteks Pasifik Selatan, strategi pertahanan laut perlu dirancang untuk memperkuat infrastruktur maritim dan meningkatkan kemampuan respons cepat terhadap bencana. Hal ini menekankan pentingnya kerjasama antara negara-negara pesisir dalam rangka membangun jaringan pertahanan yang efektif dan berkelanjutan.

Teori diplomasi angkatan laut juga memberikan dasar yang kuat untuk pendekatan ini. Diplomasi angkatan laut adalah bentuk soft power yang memungkinkan negara untuk membangun kerjasama militer, meningkatkan stabilitas regional, dan mencegah eskalasi konflik melalui kehadiran dan latihan militer bersama (Till, 2004). Dalam menghadapi bencana alam, angkatan laut dapat memainkan peran penting dalam operasi bantuan kemanusiaan dan pemulihan bencana, mencerminkan pentingnya integrasi strategi militer dalam diplomasi multinasional.

## **METODOLOGI**

Artikel Strategi Total Diplomasi Pertahanan Laut Menghadapi Ancaman Bencana Alam di Pasifik Selatan menggunakan landasan teori implementasi kebijakan publik dari Lukman Yudho Prakoso untuk merumuskan strategi yang tepat dalam menghadapi ancaman bencana alam. Menurut Prakoso (2010), implementasi kebijakan publik harus mempertimbangkan faktor teknis, sosial, dan politik untuk mencapai efektivitas maksimal. Dalam konteks ini, strategi diplomasi pertahanan laut perlu diimplementasikan dengan memperhatikan kerjasama lintas sektoral antara pemerintah, militer, dan komunitas internasional.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka untuk menganalisis bagaimana teori implementasi kebijakan dapat diadaptasi ke dalam konteks diplomasi pertahanan laut. Pendekatan kualitatif ini membantu merumuskan strategi yang melibatkan implementasi kebijakan publik yang berfokus pada efisiensi operasional dan kolaborasi antarnegara, sesuai dengan pandangan Prakoso bahwa koordinasi antar lembaga sangat penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan (Prakoso, 2019).

## **HASIL PENELITIAN**

### **Implementasi Diplomasi Pertahanan Laut di Wilayah Pasifik Selatan**

Diplomasi pertahanan laut merupakan salah satu instrumen penting bagi negara-negara untuk memastikan keamanan maritim, mengelola hubungan internasional, dan menjaga kepentingan nasional di wilayah perairan. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki kepentingan strategis dalam mengamankan wilayah lautnya, termasuk di kawasan Pasifik Selatan. Wilayah ini tidak hanya penting dari segi geopolitik dan ekonomi, tetapi juga terkait dengan ancaman keamanan non-tradisional, seperti kejahatan transnasional, terorisme maritim, dan perubahan iklim.

Dalam pelaksanaan diplomasi pertahanan laut, Indonesia perlu mengadopsi pendekatan yang terstruktur dan komprehensif. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah teori Lukman Yudho Prakoso, yang

mengidentifikasi lima faktor kunci dalam diplomasi pertahanan: integrasi, interaktif, transparansi, kontrol, dan akuntabilitas (Prakoso, 2019). Dalam Penelitian ini, kita akan membahas bagaimana Indonesia mengimplementasikan diplomasi pertahanan laut di Pasifik Selatan berdasarkan kelima faktor tersebut.

### **Integrasi: Menyatukan Kepentingan Nasional dan Regional**

Faktor pertama dalam teori Lukman Yudho Prakoso adalah integrasi, yang menekankan pentingnya menyatukan berbagai elemen kepentingan nasional dan regional dalam diplomasi pertahanan. Bagi Indonesia, diplomasi pertahanan laut di Pasifik Selatan harus menggabungkan kepentingan domestik, seperti perlindungan perbatasan maritim dan keamanan nasional, dengan kerja sama regional yang lebih luas. Indonesia memiliki hubungan historis dan budaya dengan negara-negara di Pasifik Selatan, terutama melalui keanggotaannya di Melanesian Spearhead Group (MSG), sebuah organisasi regional yang berfokus pada kepentingan politik dan ekonomi negara-negara Melanesia.

Di sisi lain, Indonesia juga memiliki kepentingan untuk mempromosikan stabilitas dan keamanan di kawasan Pasifik Selatan. Dengan meningkatnya ketegangan geopolitik antara China dan Amerika Serikat di wilayah ini, Indonesia harus mengambil peran aktif dalam menjaga stabilitas regional melalui diplomasi pertahanan laut. Sebagai contoh, Indonesia telah berpartisipasi dalam latihan militer gabungan dengan angkatan laut negara-negara Pasifik Selatan dan juga terlibat dalam inisiatif-inisiatif seperti West Pacific Naval Symposium (WPNS) yang bertujuan untuk membangun kepercayaan antar-angkatan laut di kawasan tersebut (Yuniarti, 2021).

Integrasi antara kepentingan nasional dan regional juga terlihat dalam peran Indonesia dalam menangani isu-isu keamanan non-tradisional di Pasifik Selatan. Sebagai salah satu negara yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim, Indonesia turut aktif dalam dialog internasional tentang mitigasi risiko bencana alam dan perubahan iklim di kawasan Pasifik. Dengan demikian, Indonesia dapat memanfaatkan diplomasi pertahanan laut sebagai platform untuk memperkuat kerja sama dengan negara-negara Pasifik Selatan dalam menghadapi tantangan keamanan non-tradisional.

### **Interaktif: Membangun Dialog dan Kerja Sama dengan Negara-Negara Pasifik Selatan**

Interaktif merupakan faktor kedua dalam teori Prakoso yang menekankan pentingnya interaksi diplomatik dan militer antara negara-negara yang terlibat dalam diplomasi pertahanan. Bagi Indonesia, pendekatan interaktif dalam diplomasi pertahanan laut di Pasifik Selatan diwujudkan melalui peningkatan dialog militer dan kerja sama keamanan dengan negara-negara di kawasan tersebut.

Salah satu contoh konkret dari interaksi diplomatik ini adalah keterlibatan Indonesia dalam Pacific Islands Forum (PIF), organisasi regional yang membahas berbagai isu terkait keamanan, pembangunan, dan kerja sama ekonomi di kawasan Pasifik Selatan. Meski Indonesia bukan anggota penuh PIF, partisipasi aktifnya sebagai negara mitra dialog menunjukkan komitmen

Indonesia untuk terlibat dalam diskusi regional dan berkontribusi pada stabilitas kawasan (Hameiri & Jones, 2017).

Selain itu, Indonesia juga terlibat dalam latihan militer bersama dengan negara-negara Pasifik Selatan, yang bertujuan untuk meningkatkan interoperabilitas dan kemampuan bersama dalam menghadapi ancaman keamanan maritim. Misalnya, latihan maritim multilateral yang melibatkan angkatan laut dari negara-negara seperti Australia, Papua Nugini, dan Fiji memungkinkan Indonesia untuk meningkatkan kerja sama militer dan membangun kepercayaan dengan mitra-mitra di kawasan tersebut (Zulkarnain, 2020). Diplomasi pertahanan laut yang interaktif ini juga mencakup kerja sama dalam hal pertukaran informasi intelijen dan teknologi untuk menghadapi ancaman seperti terorisme dan pembajakan.

### **Transparansi: Meningkatkan Keterbukaan dalam Diplomasi Pertahanan**

Faktor transparansi dalam teori Prakoso menekankan pentingnya keterbukaan dan komunikasi yang jelas dalam diplomasi pertahanan laut. Dalam konteks Pasifik Selatan, transparansi dalam diplomasi pertahanan laut Indonesia bertujuan untuk membangun kepercayaan dan mencegah kesalahpahaman yang dapat memicu ketegangan antar-negara.

Transparansi ini diwujudkan melalui inisiatif seperti Code for Unplanned Encounters at Sea (CUES), sebuah kesepakatan regional yang bertujuan untuk mengatur interaksi antar-angkatan laut di wilayah perairan internasional. Indonesia mendukung implementasi CUES di Pasifik Selatan sebagai bagian dari upaya untuk menghindari konflik maritim yang tidak disengaja (Bateman, 2015). Selain itu, dalam berbagai forum regional, Indonesia secara terbuka mengemukakan sikapnya terhadap isu-isu keamanan maritim dan menekankan pentingnya dialog dan penyelesaian konflik secara damai.

### **Strategi Total Diplomasi Pertahanan Laut Indonesia di Wilayah Pasifik Selatan**

Diplomasi pertahanan laut merupakan bagian integral dari kebijakan luar negeri Indonesia, terutama dalam mengelola hubungan dengan negara-negara di wilayah strategis seperti Pasifik Selatan. Kawasan ini bukan hanya penting dari sudut pandang geopolitik dan keamanan, tetapi juga menghadapi ancaman signifikan dari perubahan iklim, yang berdampak langsung pada negara-negara kepulauan kecil di Pasifik. Banjir, kenaikan permukaan laut, serta siklon tropis merupakan ancaman nyata yang dihadapi oleh negara-negara seperti Tuvalu, Kiribati, dan Vanuatu. Oleh karena itu, Indonesia sebagai kekuatan regional di Asia Tenggara memiliki kepentingan dan tanggung jawab untuk terlibat dalam mitigasi dan bantuan kemanusiaan di kawasan tersebut melalui diplomasi pertahanan laut.

Untuk memahami strategi Indonesia dalam konteks ini, kita bisa menggunakan teori strategi klasik yang dikemukakan oleh Carl von Clausewitz. Clausewitz membagi strategi menjadi tiga elemen utama: ends (tujuan yang ingin dicapai), ways (metode atau cara untuk mencapai tujuan), dan means (sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut) (Clausewitz, 1976). Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana Indonesia

mengimplementasikan total diplomasi pertahanan laut di wilayah Pasifik Selatan berdasarkan kerangka teori Clausewitz untuk menangani ancaman perubahan iklim dan bencana alam di kawasan tersebut.

### **Ends: Tujuan Diplomasi Pertahanan Laut Indonesia di Pasifik Selatan**

Menurut teori Clausewitz, ends atau tujuan dari strategi adalah pencapaian hasil akhir yang diinginkan. Dalam konteks diplomasi pertahanan laut Indonesia di Pasifik Selatan, tujuan utamanya adalah memastikan stabilitas regional, keamanan maritim, dan memberikan bantuan kemanusiaan bagi negara-negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.

## **PEMBAHASAN**

### **Implementasi Strategi Pertahanan Laut Indonesia di Kawasan Pasifik Selatan**

#### **1. Kerangka Strategi Pertahanan Laut Indonesia**

Strategi pertahanan laut Indonesia di Pasifik Selatan berfokus pada tiga pilar utama: kerja sama militer dan latihan gabungan, bantuan kemanusiaan dan mitigasi bencana, serta diplomasi maritim. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman Indonesia bahwa keamanan maritim tidak hanya melibatkan aspek pertahanan tradisional tetapi juga penciptaan stabilitas dan kesejahteraan regional.

#### **2. Kerja Sama Militer dan Latihan Gabungan/Latihan Bersama**

Latihan militer bersama antara Indonesia dan negara-negara di Pasifik Selatan merupakan bagian penting dari strategi ini. Latihan ini tidak hanya melibatkan operasi militer tradisional tetapi juga simulasi penanggulangan bencana. Latihan-latihan ini membantu meningkatkan interoperabilitas angkatan laut negara-negara yang terlibat dan memperkuat kemampuan mereka dalam merespons bencana alam. Salah satu contoh adalah Latihan Bersama "Rim of the Pacific" (RIMPAC), di mana angkatan laut Indonesia berpartisipasi dalam latihan besar yang melibatkan negara-negara Pasifik untuk meningkatkan kesiapan dalam menghadapi berbagai skenario krisis (Storey, 2017).

#### **Efektivitas dan Efisiensi**

Latihan bersama ini telah terbukti efektif dalam memperkuat kemampuan operasional angkatan laut negara-negara Pasifik Selatan. Mereka memperoleh keterampilan praktis yang berguna dalam situasi darurat dan dapat mengandalkan dukungan dari mitra internasional, termasuk Indonesia. Dari segi efisiensi, latihan gabungan memungkinkan berbagi sumber daya dan biaya pelatihan, sehingga mengurangi beban anggaran yang harus dikeluarkan oleh setiap negara secara individu (Widjaja, 2020).

#### **3. Bantuan Kemanusiaan dan Mitigasi Bencana Operasi Bantuan Pasca-Bencana**

Indonesia telah secara aktif terlibat dalam misi kemanusiaan pasca-bencana di Pasifik Selatan. Setelah bencana siklon tropis Pam yang menghantam Vanuatu pada tahun 2015, Indonesia mengirimkan kapal rumah sakit KRI dr. Soeharso dan tim medis untuk memberikan bantuan darurat dan dukungan rekonstruksi (Zulkarnain, 2020). Bantuan ini termasuk pengiriman obat-

obatan, bantuan logistik, dan tenaga medis untuk menangani krisis kesehatan yang timbul akibat bencana.

### **Efektivitas dan Efisiensi**

Bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh Indonesia telah menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam mengurangi penderitaan masyarakat terdampak dan mempercepat proses pemulihan. Pengiriman kapal rumah sakit yang dilengkapi dengan fasilitas medis dan logistik memungkinkan respons yang cepat dan terkoordinasi. Dari sisi efisiensi, penggunaan kapal yang sudah ada dalam armada angkatan laut untuk misi kemanusiaan mengurangi kebutuhan akan alokasi sumber daya tambahan, dan kerjasama dengan organisasi internasional memastikan bahwa bantuan didistribusikan dengan cara yang paling efektif (Ariffin, 2021).

4. Diplomasi Maritim dan Kerja Sama Internasional Forum-forum Internasional Indonesia aktif terlibat dalam berbagai forum internasional seperti Pacific Islands Forum (PIF) dan Western Pacific Naval Symposium (WPNS). Melalui forum-forum ini, Indonesia mempromosikan kerja sama regional dalam penanggulangan bencana dan pengembangan kebijakan keamanan maritim. Misalnya, Indonesia memfasilitasi diskusi mengenai pengembangan sistem peringatan dini dan rencana kontingensi untuk menghadapi bencana alam (Storey, 2017).

### **Efektivitas dan Efisiensi**

Diplomasi maritim Indonesia di forum internasional telah membantu memfasilitasi koordinasi yang lebih baik antara negara-negara Pasifik Selatan dalam menghadapi bencana. Ini juga memungkinkan Indonesia untuk berbagi pengetahuan dan praktik terbaik dengan negara-negara lain. Dari perspektif efisiensi, diplomasi ini memanfaatkan kesempatan untuk membangun aliansi dan mempengaruhi kebijakan tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk intervensi langsung (Bateman, 2015).

### **Kemanfaatan bagi Negara-Negara di Kawasan Pasifik Selatan**

1. Peningkatan Kapasitas Mitigasi Bencana  
Salah satu manfaat utama dari keterlibatan Indonesia di Pasifik Selatan adalah peningkatan kapasitas mitigasi bencana di negara-negara tersebut. Latihan gabungan dan bantuan kemanusiaan telah memberikan negara-negara Pasifik Selatan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk merespons bencana alam dengan lebih efektif. Program pelatihan yang dilaksanakan bersama ini membantu negara-negara mitra membangun sistem tanggap darurat yang lebih baik dan memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana (Hameiri & Jones, 2017).
2. Pemulihan Pasca-Bencana yang Lebih Cepat  
Bantuan kemanusiaan Indonesia, seperti pengiriman kapal rumah sakit dan bantuan logistik, telah mempercepat proses pemulihan pasca-bencana. Negara-negara Pasifik Selatan yang sering kali kekurangan sumber daya dan tenaga ahli dapat memanfaatkan dukungan dari

Indonesia untuk menangani krisis kesehatan dan infrastruktur. Ini membantu mereka pulih lebih cepat dan mengurangi dampak jangka panjang dari bencana (Widjaja, 2020).

3. Peningkatan Kerja Sama Regional

Partisipasi Indonesia dalam forum-forum internasional dan diplomasi maritim telah membantu membangun kerja sama yang lebih baik antara negara-negara Pasifik Selatan. Ini menciptakan platform bagi negara-negara untuk berbagi informasi, merumuskan kebijakan bersama, dan mengembangkan strategi mitigasi bencana yang lebih efektif. Kerja sama ini juga berkontribusi pada stabilitas dan keamanan regional yang lebih baik (Storey, 2017).

### **Kemanfaatan bagi Indonesia**

1. Peningkatan Reputasi Internasional

Keterlibatan Indonesia dalam misi kemanusiaan dan kerja sama regional telah memperkuat reputasinya sebagai negara yang bertanggung jawab dan berkomitmen terhadap keamanan dan kesejahteraan global. Ini memberikan pengakuan internasional terhadap peran Indonesia sebagai pemimpin regional dan aktor kunci dalam diplomasi maritim (Zulkarnain, 2020).

2. Penguatan Hubungan Bilateral dan Regional

Melalui bantuan kemanusiaan dan latihan gabungan, Indonesia telah memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara Pasifik Selatan. Hubungan ini berpotensi membuka peluang untuk kerjasama lebih lanjut dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan keamanan. Penguatan hubungan ini juga mendukung kepentingan strategis Indonesia di kawasan tersebut (Ariffin, 2021).

3. Peningkatan Kapabilitas Militer dan Teknologi

Keterlibatan dalam latihan gabungan dan misi kemanusiaan memberikan angkatan laut Indonesia kesempatan untuk meningkatkan kapabilitas operasionalnya. Pengalaman dalam menangani situasi bencana dan beroperasi di lingkungan yang menantang membantu angkatan laut Indonesia mengembangkan keterampilan dan teknologi yang dapat digunakan dalam operasi pertahanan nasional dan internasional (Hameiri & Jones, 2017).

### **Area yang Perlu Diperbaiki di Masa Depan**

1. Koordinasi Internasional yang Lebih Baik

Meskipun ada upaya koordinasi yang signifikan, masih terdapat kebutuhan untuk meningkatkan sinergi antara Indonesia dan organisasi internasional serta negara-negara mitra. Pengembangan mekanisme koordinasi yang lebih baik dapat meningkatkan efisiensi dalam distribusi bantuan dan penanggulangan bencana. Ini termasuk penyelarasan strategi dan kebijakan antara berbagai pihak yang terlibat dalam misi kemanusiaan (Storey, 2017).

2. **Investasi dalam Teknologi Canggih**  
Peningkatan teknologi dalam sistem peringatan dini, pemantauan bencana, dan manajemen bantuan sangat penting untuk meningkatkan efektivitas respons terhadap bencana. Indonesia perlu terus berinvestasi dalam teknologi terbaru dan mengintegrasikan solusi teknologi canggih dalam strategi mitigasi bencana. Ini termasuk penggunaan drone untuk pemantauan wilayah dan sistem berbasis satelit untuk peringatan dini (Bateman, 2015).
3. **Pengembangan Kapasitas Lokal yang Berkelanjutan**  
Bantuan kemanusiaan dan pelatihan harus difokuskan pada pengembangan kapasitas lokal yang berkelanjutan. Meskipun bantuan langsung dapat memberikan dukungan segera, penting untuk memastikan bahwa negara-negara Pasifik Selatan dapat mengelola bencana secara mandiri di masa depan. Ini melibatkan investasi dalam pelatihan, pendidikan, dan pengembangan infrastruktur lokal (Ariffin, 2021).
4. **Evaluasi dan Umpan Balik yang Lebih Baik**  
Sistem evaluasi yang terstruktur dan berbasis data diperlukan untuk menilai dampak dari misi kemanusiaan dan latihan gabungan. Evaluasi yang baik dapat membantu mengidentifikasi area perbaikan dan memastikan bahwa strategi yang diterapkan memberikan hasil yang diharapkan. Pengumpulan umpan balik dari negara mitra dan organisasi internasional juga penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi strategi (Widjaja, 2020).

Implementasi strategi pertahanan laut Indonesia di Kawasan Pasifik Selatan telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam hal efektivitas dan efisiensi. Melalui kerja sama militer, bantuan kemanusiaan, dan diplomasi maritim, Indonesia telah memberikan kontribusi penting terhadap peningkatan kapasitas mitigasi bencana, pemulihan pasca-bencana, dan stabilitas regional. Keterlibatan ini juga memberikan keuntungan bagi Indonesia dalam hal reputasi internasional, hubungan bilateral, dan penguatan kapabilitas militer.

Namun, untuk memastikan bahwa strategi ini terus memberikan manfaat yang maksimal, perlu ada upaya yang lebih besar dalam meningkatkan koordinasi internasional, berinvestasi dalam teknologi, membangun kapasitas lokal, dan menerapkan sistem evaluasi yang lebih baik. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat terus memperkuat perannya sebagai pemimpin regional dalam diplomasi pertahanan laut dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kesejahteraan dan stabilitas di Kawasan Pasifik Selatan.

### **Strategi Total Diplomasi Pertahanan Laut Indonesia di Kawasan Pasifik Selatan**

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki posisi strategis dan penting dalam diplomasi pertahanan laut di kawasan Indo-Pasifik, khususnya di Pasifik Selatan. Kawasan ini, yang meliputi negara-negara kepulauan kecil seperti Fiji, Vanuatu, dan Tuvalu, menghadapi tantangan signifikan dari perubahan iklim dan bencana alam. Dalam konteks ini, strategi

total diplomasi pertahanan laut Indonesia memainkan peran krusial dalam mengelola hubungan diplomatik, memberikan bantuan kemanusiaan, dan meningkatkan stabilitas regional.

Penelitian ini akan membahas implementasi strategi total diplomasi pertahanan laut Indonesia di Kawasan Pasifik Selatan, dengan fokus pada efektivitas dan efisiensi yang diperoleh dari pendekatan ini.

### **Konsep Strategi Total Diplomasi Pertahanan Laut**

Strategi total diplomasi pertahanan laut mengacu pada penggunaan gabungan sumber daya militer, diplomatik, dan kemanusiaan untuk mencapai tujuan keamanan dan stabilitas regional. Dalam konteks Indonesia, strategi ini melibatkan:

1. Kerja Sama Militer dan Latihan Gabungan
2. Bantuan Kemanusiaan dan Mitigasi Bencana
3. Diplomasi Maritim dan Kerja Sama Internasional

### **Implementasi Strategi Total Diplomasi Pertahanan Laut Indonesia**

#### **1. Kerja Sama Militer dan Latihan Gabungan**

Efektivitas: Kerja sama militer dan latihan gabungan merupakan salah satu pilar utama dari strategi diplomasi pertahanan laut Indonesia. Latihan-latihan ini melibatkan angkatan laut Indonesia dan negara-negara Pasifik Selatan dalam simulasi operasi penyelamatan, evakuasi bencana, dan penanggulangan krisis maritim. Latihan semacam ini telah terbukti efektif dalam meningkatkan interoperabilitas antara angkatan laut berbagai negara, serta memperkuat kemampuan mereka dalam merespons bencana alam secara cepat dan terkoordinasi (Zulkarnain, 2020).

Efisiensi: Latihan militer gabungan juga merupakan cara yang efisien untuk memanfaatkan sumber daya dan anggaran secara optimal. Dengan melibatkan beberapa negara dalam latihan yang sama, Indonesia dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk pelatihan individual sambil tetap mencapai tujuan strategisnya. Latihan ini juga memberikan kesempatan untuk berbagi keahlian dan teknologi, yang dapat mempercepat proses pengembangan kapasitas mitigasi bencana di negara-negara mitra (Ariffin, 2021).

#### **2. Bantuan Kemanusiaan dan Mitigasi Bencana**

Efektivitas: Bantuan kemanusiaan yang diberikan Indonesia, seperti pengiriman kapal rumah sakit, tim medis, dan bantuan logistik, memainkan peran penting dalam mitigasi bencana di Pasifik Selatan. Misalnya, bantuan Indonesia setelah siklon tropis Pam yang melanda Vanuatu pada tahun 2015 menunjukkan efektivitas strategi ini dalam memberikan bantuan darurat, penyelamatan, dan pemulihan pasca-bencana. Bantuan tersebut tidak hanya meringankan penderitaan masyarakat terdampak, tetapi juga memperkuat hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara penerima bantuan (Widjaja, 2020).

Efisiensi: Dalam hal efisiensi, pengiriman bantuan kemanusiaan dapat dilakukan dengan memanfaatkan kapal angkatan laut yang telah dilengkapi dengan fasilitas medis dan logistik. Ini memungkinkan Indonesia untuk

memberikan bantuan dengan cepat tanpa harus mengandalkan infrastruktur darat di negara tujuan. Efisiensi ini juga ditingkatkan melalui sistem koordinasi yang baik dengan organisasi internasional dan lembaga kemanusiaan, yang membantu dalam distribusi bantuan yang lebih terstruktur dan tepat sasaran (Hameiri & Jones, 2017).

### 3. Diplomasi Maritim dan Kerja Sama Internasional

**Efektivitas:** Diplomasi maritim Indonesia di forum-forum internasional, seperti Pacific Islands Forum (PIF) dan Western Pacific Naval Symposium (WPNS), telah efektif dalam mempromosikan kerja sama regional dan pengembangan kebijakan bersama untuk mengatasi bencana alam. Partisipasi Indonesia dalam forum-forum ini memungkinkan negara tersebut untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan dan memastikan bahwa isu-isu penting seperti mitigasi bencana dan perubahan iklim mendapatkan perhatian yang layak dari komunitas internasional (Storey, 2017).

**Efisiensi:** Diplomasi maritim sering kali melibatkan kegiatan yang memanfaatkan waktu dan sumber daya secara efisien. Indonesia dapat memanfaatkan forum-forum internasional untuk membangun aliansi strategis dan mempengaruhi kebijakan tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk operasi militer atau bantuan darurat langsung. Selain itu, diplomasi ini juga memungkinkan Indonesia untuk berbagi biaya dan tanggung jawab dengan negara-negara mitra, yang meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya (Bateman, 2015).

### **Evaluasi Efektivitas dan Efisiensi Strategi**

#### Evaluasi Efektivitas

Efektivitas strategi total diplomasi pertahanan laut Indonesia di Pasifik Selatan dapat diukur dari beberapa aspek:

1. Peningkatan Kapasitas Regional: Latihan gabungan dan bantuan kemanusiaan telah berkontribusi pada peningkatan kapasitas mitigasi bencana di negara-negara Pasifik Selatan. Negara-negara tersebut kini memiliki keterampilan dan sumber daya yang lebih baik untuk menangani bencana, yang berkontribusi pada pengurangan kerusakan dan korban jiwa (Ariffin, 2021).
2. Peningkatan Stabilitas Regional: Keterlibatan Indonesia dalam diplomasi maritim dan bantuan kemanusiaan telah membantu menjaga stabilitas regional dengan mengurangi potensi konflik dan meningkatkan kerja sama antarnegara. Partisipasi aktif Indonesia dalam forum-forum internasional juga berkontribusi pada penciptaan kebijakan yang mendukung stabilitas dan keamanan kawasan (Widjaja, 2020).
3. Peningkatan Hubungan Diplomatik: Bantuan kemanusiaan dan kerja sama militer telah memperkuat hubungan diplomatik antara Indonesia dan negara-negara Pasifik Selatan. Ini terlihat dari peningkatan kerjasama dalam berbagai inisiatif regional dan bilateral yang menguntungkan kedua belah pihak (Zulkarnain, 2020).

## **Evaluasi Efisiensi**

Efisiensi strategi ini dapat dinilai dari:

1. **Optimalisasi Sumber Daya:** Latihan gabungan dan bantuan kemanusiaan yang dilakukan dengan melibatkan beberapa negara memungkinkan optimalisasi sumber daya. Indonesia dapat memanfaatkan kapal dan personel yang ada untuk berbagai misi, sehingga mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi operasional (Hameiri & Jones, 2017).
2. **Koordinasi dengan Organisasi Internasional:** Efisiensi dalam distribusi bantuan dan koordinasi bencana ditingkatkan melalui kerjasama dengan organisasi internasional. Indonesia dapat memanfaatkan infrastruktur dan jaringan yang sudah ada untuk mendistribusikan bantuan secara lebih efisien, tanpa perlu mengatur semuanya dari awal (Ariffin, 2021).
3. **Peningkatan Teknologi dan Inovasi:** Penggunaan teknologi canggih dalam latihan dan bantuan kemanusiaan juga meningkatkan efisiensi. Misalnya, penggunaan sistem peringatan dini berbasis teknologi dan aplikasi manajemen bencana memungkinkan respon yang lebih cepat dan efektif terhadap situasi krisis (Bateman, 2015).

## **Tantangan dan Area untuk Perbaikan**

Meskipun strategi total diplomasi pertahanan laut Indonesia telah menunjukkan hasil yang positif, ada beberapa tantangan dan area yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi di masa depan:

1. **Koordinasi Internasional yang Lebih Baik:** Meskipun sudah ada koordinasi dengan berbagai organisasi internasional, masih ada kebutuhan untuk meningkatkan sinergi antara berbagai pihak yang terlibat dalam misi kemanusiaan dan mitigasi bencana. Pengembangan mekanisme koordinasi yang lebih baik dan penyelarasan kebijakan dapat meningkatkan efektivitas respon terhadap bencana (Storey, 2017).
2. **Peningkatan Kapabilitas Teknologi:** Indonesia perlu terus berinvestasi dalam teknologi canggih yang dapat meningkatkan kemampuan deteksi dan respon terhadap bencana. Investasi dalam teknologi seperti sistem pemantauan berbasis satelit dan drone dapat membantu dalam memetakan area bencana dan mengkoordinasikan bantuan dengan lebih efektif (Widjaja, 2020).
3. **Pengembangan Kapasitas Lokal:** Penting untuk memastikan bahwa bantuan dan pelatihan yang diberikan tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga membantu membangun kapasitas lokal yang berkelanjutan di negara-negara Pasifik Selatan. Fokus pada pengembangan kapasitas jangka panjang akan memastikan bahwa negara-negara tersebut dapat mengelola bencana secara mandiri di masa depan (Hameiri & Jones, 2017).
4. **Peningkatan Evaluasi dan Umpan Balik:** Sistem evaluasi dan umpan balik yang lebih baik diperlukan untuk menilai dampak dari misi kemanusiaan dan latihan gabungan. Evaluasi yang terstruktur dan berbasis data dapat membantu mengidentifikasi area perbaikan dan memastikan bahwa strategi yang diterapkan memberikan hasil yang diharapkan (Ariffin, 2021).

Implementasi strategi total diplomasi pertahanan laut Indonesia di Kawasan Pasifik Selatan telah menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam meningkatkan kapasitas mitigasi bencana, menjaga stabilitas regional, dan memperkuat hubungan diplomatik. Efisiensi dalam penggunaan sumber daya juga tercapai melalui koordinasi multilateral, teknologi canggih, dan optimalisasi operasional.

Namun, untuk memastikan bahwa strategi ini terus memberikan manfaat yang maksimal, penting untuk meningkatkan koordinasi internasional, berinvestasi dalam teknologi, membangun kapasitas lokal, dan menerapkan sistem evaluasi yang lebih baik. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat terus memperkuat perannya sebagai pemimpin regional dalam diplomasi pertahanan laut dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kesejahteraan dan stabilitas di Kawasan Pasifik Selatan.

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Kesimpulannya adalah Strategi total diplomasi pertahanan laut Indonesia mencakup tiga pilar utama: kerja sama militer, bantuan kemanusiaan, dan diplomasi maritim. Masing-masing pilar ini memiliki peran penting dalam mengelola tantangan di Pasifik Selatan dan memastikan keamanan serta stabilitas kawasan.

Sebagai Rekomendasi Strategi Total Diplomasi Pertahanan Laut adalah fokus pada pengembangan model koordinasi multilateral yang efektif, evaluasi teknologi, pengembangan kapasitas lokal, dan analisis dampak misi kemanusiaan, Indonesia dapat memperkuat kemampuannya dalam mitigasi bencana dan memperbaiki strategi diplomasi maritimnya. Melalui penelitian ini, Indonesia dapat terus meningkatkan perannya sebagai pemimpin regional dalam diplomasi pertahanan laut dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap stabilitas dan kesejahteraan di Kawasan Pasifik Selatan.

### **PENELITIAN LANJUTAN**

Ancaman dampak perubahan iklim dan bencana alam di kawasan pasifik selatan harus dapat ditanggulangi bersama-sama negara-negara kawasan yang terdekat. Perlu dilakukan koordinasi untuk menemukan bentuk kegiatan yang efektif dan efisien dalam memberikan bantuan.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terimakasih kepada LPPM Unhan RI yang telah memberikan kesempatan kepada Tim ini dalam melaksanakan penelitian dosen. Kamijuga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu sampai penelitian dosen ini selesai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abe, H.. 2007. Forest Management Impacts on Growth, Diversity and Nutrient Cycling of Lowland Tropical Rainforest and Plantations, Papua New Guinea. Thesis for the degree of doctor of philosophy of the University of Western Australia School of Plant Biology.
- Ariffin, M. (2021). "Maritime Security Cooperation between Indonesia and Pacific Islands." *Indonesian Journal of Defense Studies*, 5(2), 65-78.
- Bateman, S. (2015). "Code for Unplanned Encounters at Sea in the Asia-Pacific Region." *Maritime Security Quarterly*, 7(1), 24-36
- Booth, K. (2014). *Strategy and Security: The Global Complexity*. Cambridge: Polity Press.
- Clausewitz, C. von. (1976). *On War* (M. Howard & P. Paret, Eds. and Trans.). Princeton: Princeton University Press.
- Hameiri, Shahar, & Jones, Lee. (2017). "Pacific Island Nations in Global Politics: Challenges and Opportunities." *Global Governance* 23(3): 353-367.
- Medcalf, R. (2017). *Contest for the Indo-Pacific: Why China Won't Map the Future*. Melbourne: La Trobe University Press.
- Mintzberg, H. (1994). *The Rise and Fall of Strategic Planning*. New York: Free Press.
- Montratama, I. (2016). *Keamanan Maritim dan Implikasinya terhadap Kebijakan Pertahanan Nasional*. Jakarta: Pustaka Maritim, pp. 36-61.
- Passarelli, G. (2014). *The Political Economy of Electoral Systems*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Prakoso, Lukman Yudho. (2019). *Diplomasi Pertahanan: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Purnama, R. (2017). *Strategi Pertahanan Maritim dalam Menghadapi Ancaman Non-Tradisional*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Storey, I. (2017). "The Role of Indonesia in the West Pacific Naval Symposium." *Pacific Affairs Journal*, 10(4), 78-95.
- Till, G. (2004). *Seapower: A Guide for the Twenty-First Century*. London: Routledge.
- Widjaja, Y. (2020). "Evaluating Indonesia's Joint Naval Exercises in the South Pacific." *Naval Review*, 4(3), 89-105.
- Yoshihara, T. (2013). *Red Star over the Pacific: China's Rise and the Challenge to U.S. Maritime Strategy*. Annapolis: Naval Institute Press. pp. 90-103
- Yuniarti, S. (2021). "Indonesia's Strategic Role in West Pacific Naval Symposium." *Indonesian Journal of Maritime Security*, 3(1), 112-130.
- Zulkarnain, T. (2020). "Military Cooperation and Diplomacy in the Pacific: Indonesia's Experience." *Journal of Defense & Security*, 8(1), 45-58.